

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *"Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. I"*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi"*, Rajawali Press, Jakarta.
- Atep Adya Barata, 2003, *"Dasar-Dasar Pelayanan Prima"*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Bachtiar, 2020, *"Metode Penelitian Hukum"*, UNPAM Press, Universitas Pamulang.
- Bambang Sunggono, 2013, *"Metodologi Penelitian Hukum"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani dan H. Yana Sulistina, 2018, *"Metode Penelitian Hukum"*, Pustaka Setia, Bandung.
- Chadijah Dalimunthe, 2000, *"Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Pelaksanaannya"*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Daryanto dan Ismanto Setyobudi, 2014, *"Konsumen dan Pelayanan Prima"*, Gava Media, Yogyakarta.
- Fandy Tjiptono, 2016, *"Service, Quality Dan Satisfaction, Manajemen Desa"*, ANDI, Yogyakarta.
- H. Zainuddin Ali, 2013, *"Metode Penelitian Hukum"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasan Wargakusumah, 2001, *"Hukum Agraria: Buku Panduan Mahasiswa"*, Prenhallindo, Jakarta.
- Juhana Wijaya, 2011, *"Prinsip-Prinsip Kerjasama Dengan Kolega Dan Pelanggan"*, Yudhistira Ghalia, Jakarta.
- Lukman Santoso Az, 2015 *"Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia"*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008 *"Hukum Pendaftaran Tanah"*, CV, Mandar Maju, Bandung,.
- Moenir H.A.S, 2015, *"Manajemen Pelayanan Umum Indonesia"*, Bumi Aksara Cetakan ke-XII, Jakarta.
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Muchsin dkk, 2007, *"Hukum Agraria Indonesia Dalam Perpektif Sejarah"*, Refika Aditama, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *"Metode Penelitian Hukum"*, Unpram Press, Nusa Tenggara Barat.
- Nyoman Guntur, 2014, *"Modul Pendaftaran Tanah"*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Rambat Lupiyoadi, Dan Dedy A. Hamdani, 2011, *"Manajemen Pemasaran Jasa Edisi Kedua"*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ratminto Dan Atik Septi Winarsih, 2013, *"Manajemen Pelayanan"*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2014, *"Metode Penelitian Kuantitatif"*, Alfabeta, Bandung.
- Sujardi, 2009, *"Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik"*, Refika Aditama, Jakarta.
- Sumarja, 2010, *"Hukum Pendaftaran Tanah"*, Universitas Lampung, Lampung.
- Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Umar Said Sugiharto dkk, 3015, *"Hukum Pengadaan Tanah"*, Setara Press, Malang.
- Urip Santoso, 2010, *"Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah"*, Kencana, Jakarta.
- Waskito dan Hadi Arnowo, 2019, *"Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia,"* Prenadamedia Group, Jakarta.

**Jurnal:**

- Andi Tenrisau, 2021, *"Landasan Pengelolaan Pertanahan Dalam Sistem Penataan Agraria Kebelanjutan"*, Jurnal Pertanahan, Vol. 11, No. 2.
- Bambang Eko Muljono, 2016, *"Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Melalui Pengakuan Hak"*, Jurnal Independent, Vol. 4, No. 1.
- Denik Puspita, 2019, *"Problematik Penerapan Asas Terjangkau Dalam Pendaftaran Tanah"*, Jurnal Pena Justisia, Vol. 18, No. 2.

Dewi Safitri, 2019, *“Responsivitas Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngajuk”*, Jurnal Universitas Negeri Surabaya, Vol. 7, No. 1.

Ida Yunari Ristiani, 2020, *“Manajemen Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat”*, Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 11, No. 2.

Indri A. Gobel, 2017, *“Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Penanaman Modal Di Indonesia Menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007”*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5, No. 8.

Muhammad Ilham Arisaputra dan Sri Wildan Ainun Mardiah, *“Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan Di Indonesia Studi Komperatif”*, Jurnal Amanna Gappa, Vol. 27, No. 2.

Setiana Sanjaya dkk, 2021, *“Akibat Hukum Konversi Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 3.

Setiana Sanjaya dkk, 2021, *“Akibat Hukum Konversi Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 3.

Suhartoyo, 2019, *“Implementasi Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)”*, Jurnal Administrative Law Dan Governance, Vol. 2, No. 1.

Syendy A. Korompis, 2018, *“Pengaturan Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Menjadi Hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”*, Lex Privatum, Vol. 6, No. 1.

Ulfia Hasanah, 2012, *“Status Kepelimiran Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960”*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

**Website:**

Victor William Benu, “Membaca Hak Publik di Kantor Pertanahan”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--membaca-hak-publik-di-kantor-pertanahan>, diakses 14 Maret 2021.

Wanton Siadruk, “*Ombudsman RI Luncurkan Laporan Tahunan 2021, Layanan Pemda Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat*”, <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-luncurkan-laporan-tahunan-2021--layanan-pemda-paling-banyak-dilaporkan-masyarakat>, diakses pada 30 Mei 2022.

